

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

*Fraud* atau yang sering dikenal dengan istilah kecurangan merupakan hal yang banyak di bicarakan di Indonesia. Pengertian *fraud* itu sendiri merupakan penipuan yang sengaja di lakukan, yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya (Sukanto dikutip di Adji 2021:171). Suandi dan Riani (2019:192) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan illegal apapun yang ditandai dengan penipuan, menyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. *The Association Certified Fraud Examiners* (ACFE) mendefinisikan *Fraud* sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain yang dilakukan oleh orang dalam atau orang luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi hingga kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Menurut ACFE, 2016 kecurangan atau *fraud* diklasifikasikan dalam tiga tingkatan yang di sebut *fraud tree*, yaitu korupsi, penyimpangan atas aset, dan pernyataan palsu atau salah pernyataan. Korupsi dalam kategori ini adalah penyuapan. Pada penyimpangan atas aset meliputi pencurian aset atau harta. Pernyataan palsu meliputi tindakan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya.

Kecurangan sendiri dapat terjadi di berbagai sektor, baik di sektor swasta maupun di sektor pemerintahan. Pada sektor pemerintahan kecendrungan

kecurangan akuntansi dilakukan dalam bentuk kebocoran anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), sedangkan di sektor swasta bentuk kecenderungan kecurangan akuntansi terjadi dalam bentuk yang sama yaitu ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber dana (Thoyibatun dikutip di Zulfidah2009:3). Sedangkan Surjandari dan Martaningtyas (2015) menyatakan salah satu jenis *fraud* yang paling sering terjadi di sektor pemerintahan yaitu berkaitan dengan korupsi. Menurut Herdiansyah (2021:2) Korupsi dapat dipahami sebagai tindakan perampokan terhadap uang negara yang tentu saja bersumber dari rakyat. Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya fraud yang tidak bisa di hapuskan secara total, maka suatu organisasi harus mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance*.

Pengendalian internal merupakan salah satu kunci organisasi dalam mencapai tujuannya. *Commite Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commision* (COSO) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan insrumen terpenting yang dapat menyediakan *reasonable assurance* (jaminan yang layak) mengenai pencapaian dari tujuan atas kategori tertentu. IFAC (*International Federation Of Accountans*) mendefinisikan pengendalian internal sebagai sistem yang dimiliki organisasi untuk mengelola risiko yang dilaksanakan, dipahami dan diawasi oleh tingkat pimpinan, manajemen, hingga karyawan untuk mendapatkan keuntungan dan mencegah kerugian guna mencapai tujuan organisasi.

Menurut peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 yang membedakan dengan sistem pengendalian internal diperusahaan adalah pengamanan aset negara

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Zulfaidah (2020:6). Pengendalian internal memerlukan pengawasan untuk memastikan pengendalian internal dapat berjalan secara efektif. Penerapan pengendalian internal efektif yang didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk persoalan dan ketidakwajaran yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan. Keefektifan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Tindakan kecurangan dapat terjadi karena lemahnya penerapan *corporate governance* atau lemahnya pemahaman yang menyeluruh tentang konsep *fraud* termasuk mengetahui motivasi orang melakukan *fraud* serta tanda-tanda terjadinya *fraud*. Semua pemangku kepentingan organisasi hendaknya mampu memahami bahwa penerapan *good corporate governance* termasuk mempertimbangkan semua prinsip tata kelola, diharapkan dapat mencegah atau mengurangi terjadinya *fraud*, Hamdani (2016:145).

Istilah *corporate governance* diperkenalkan pertama kali oleh komite *Cadbury* pada tahun 1992. Komite *Cadbury* mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada stakeholder. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.

*Organization For Economic Cooperation And Development* (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak

manajemen perusahaan, pemegang saham, dan pihak lainnya yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.

Kusmayadi dikutip oleh sari (2012), bahwa dalam perspektif sektor publik maka secara konseptual pengertian tata kelola pemerintahan (*good corporate governance*) yang baik mengandung dua pemahaman yaitu: 1) nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan 2) nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

*Good corporate governance* secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena *good corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut komite nasional kebijakan governance adalah: 1) transparansi, 2) akuntabilitas, 3) independensi, 4) kewajaran dan 5) tanggung jawab.

Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten OKU tahun 2020 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualin (WTP). BPK menemukan beberapa permasalahan, permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan harus terus diperbaiki oleh Pemkab OKU, sehingga tidak terulang kembali dimasa akan datang, yaitu: (1) Penatausahaan Persediaan pada tiga OPD, dan pengelolaan Aset Tetap belum memadai; (2) Pengelolaan

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Sekretariat Daerah kurang memadai; (3) Klasifikasi penganggaran Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak tepat; Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan, kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD, dan kelebihan pembayaran 45 Paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan (5) Sebanyak 373 penerima Bantuan Sosial dalam bentuk uang dengan NIK ganda (<https://sumsel.bpk.go.id/?p=30327>).

Dengan adanya temuan BPK tersebut, menunjukkan lemahnya pengelolaan pada Sistem Pengendalian Intern. Pada prakteknya pemerintah Kabupaten OKU sering tidak konsisten dalam menjalankan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Permasalahan di Kabupaten OKU secara umum terlihat pada lemahnya pengendalian intern kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemerintah kabupaten yang seharusnya dilaksanakan tapi belum diterapkan dengan optimal. Adanya temuan berulang serta penatausahaan dan pengelolaan Aset tetap belum memadai, belum dibuat Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta berbagai kelemahan Sistem Pengendalian Intern lainnya. Hal ini disebabkan oleh keandalan SPIP masih berbeda dari masing-masing SKPD serta efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai

Untuk melihat kondisi sebenarnya mengenai pengendalian internal di badan keuangan dan aset daerah (BKAD) kabupaten OKU dilakukan pra-surpey

dengan menyebarkan kuesioner, yang terdiri dari beberapa indikator mengenai pengendalian internal kepada pegawai BKAD. Berdasarkan penyebaran kuesioner tersebut diperoleh data tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Hasil Kuesioner Mengenai Pengendalian Internal di Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten OKU**

PERNYATAAN		JAWABAN					Rata-rata
		SS	S	RR	TS	STS	
		5	4	3	2	1	
<b>A</b>	<b>Lingkungan Pengendalian</b>						
1.	Di instansi tempat saya bekerja penerapan wewenang dan tanggung jawab instansi dirasakan penting	66,7	33,3				3,67
2.	Pimpinan menyampaikan secara langsung peraturan,kebijakan dan standar kebijakan pada pegawai	33,3	66,7				3,33
3.	Instansi memiliki integritas dan nilai etika yang baik dalam menunjang pencapaian tujuan	16,7	83,3				3,17
4.	Instansi memiliki integritas dan nilai etika yang baik dalam menunjang pencapaian tujuan	50,0	50,0				3,50
5.	Instansi sudah memiliki struktur organisasi yang dapat menjelaskan tugas dan wewenang dengan tepat	33,3	66,7				3,33
<b>B</b>	<b>Penilaian Risiko</b>						
6.	Saya dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam melakukan pekerjaan	50,0	33,3	16,7			3,33
7.	Saya dapat memperhitungkan besarnya risiko bagi lembaga apabila lalai dalam bekerja	50,0	50,0				3,50
8.	Saya dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam melakukan	16,7	16,7	66,7			2,50

	pekerjaan						
C	Kegiatan Pengendalian						
9.	Saya memahami prosedur pengendalian fisik aset atau barang dalam instansi	33,3	16,7	50,0			2,83
10.	Terdapat pemisahan tugas yang jelas antara fungsi-fungsi yang ada untuk menghindari kesalahan maupun kecurangan instansi	50,0	50,0	75,0			3,50
11.	Kegiatan yang dilakukan pegawai dalam instansi selalu diketahui dan di setujui oleh pimpinan	16,7	83,3				3,17
12.	Saya memiliki dokumen dan catatan yang lengkap untuk setiap transaksi yang telah dilakukan	33,3	66,7				3,33
13.	Adanya evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh pegawai	83,3	16,7				3,83
D	Pengawasan						
14.	Pimpinan memantau kinerja pegawai terus menerus	33,3	66,7				3,33
15.	Pimpinan mengevaluasi hasil dari pemantauan yang telah dilakukan	33,3	66,7				3,33
16.	Pimpinan menindak lanjuti hasil pemantauan	50,0	33,3	16,7			3,33
E	Informasi Dan Komunikasi						
17.	Saya menganggap bahwa sistem informasi yang dimiliki instansi sudah sesuai dengan kebutuhan instansi	16,7	66,7	16,7			3,00
18.	Saya selalu memperoleh dan mengkomunikasikan informasi ke semua pihak yang terkait sesuai dengan informasi yang benar	33,3	66,7				3,33
19.	Saya mengklasifikasikan informasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan	50,0	50,0				3,50

Berdasarkan hasil pra survey tabel 1.1 terdapat permasalahan mengenai pengendalian internal di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten OKU. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil rata-rata yang paling terkecil yang terdapat di indikator penilaian risiko, yaitu sebesar 2,50 hal ini bisa terjadi disebabkan oleh kurangnya penilaian risiko.

Permasalahan lain yang terjadi dalam pengendalian internal yaitu kegiatan pengendalian, hal ini bisa dibuktikan dari hasil rata-rata sebesar 2,83 dimana pegawai di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten OKU masih belum memahami prosedur pengendalian fisik aset atau barang instansi, hal tersebut mengakibatkan pegawai tidak teliti dan menjaga keamanan harta milik instansi. Untuk itu pengendalian internal di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten OKU harus ditingkatkan dengan meningkatkan pemahaman tentang pengendalian fisik aset atau barang dalam instansi sehingga pengendalian internal dapat terwujud.

*Good corporate governance* juga sangat berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, tabel 1.2 akan menggambarkan lebih jelas tentang *good corporate governance* di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten OKU. Berikut hasil dilakukannya pra-survey dengan menyebar kuesioner yang terdiri dari beberapa indikator mengenai *good corporate governance*. Berdasarkan penyebaran kuesioner tersebut diperoleh data pada tabel 1.2 sebagai berikut :



**Tabel 1.2**  
**Hasil kuesioner mengenai good corporate governance di Badan Keuangan**  
**Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten OKU**

PERNYATAAN		JAWABAN					Rat-rata
		SS	S	RR	TS	STS	
		5	4	3	2	1	
<b>A</b>	<b>Transparansi (<i>Transparency</i>)</b>						
1.	Instansi selalut ransparan/terbuka akan akses informasi mengenai prosedur, syarat, waktu, dan biaya dalam proses pelayanan	66,7	33,3				3,67
2.	Instansi menempatkan laporan keuangan dan analisisnya di internet	50,0	50,0				3,50
3.	Instansi menyampaikan uraian mengenai kondisi instansi	83,3	16,7				3,83
<b>B</b>	<b>Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)</b>						
4.	Instansi memiliki pedoman corporate governance yang tertulis di mana di dalamnya mengatur secara rinci hak-hak dan kewajiban pegawai	33,3	66,7				3,33
5.	Instansi mempunyai pedoman etik mengenai tingkah laku secara tertulis	33,3	66,7				3,33
6.	Pedoman kode etik tersebut didistribusikan kepada semua pegawai	33,3	16,7	16,7			3,17
<b>C</b>	<b>Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>)</b>						
7.	Instansi berpegang pada prinsip kehati-hatian, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan pemerintahan	33,3	66,7				3,33
8.	Kewajiban instansi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tepat waktu	16,7	16,7	66,7			2,50
9.	Instansi melakukan tanggungjawab sosial dengan cara meningkatkan	50,5	50,0				3,50

	atau menerapkan kepedulian kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitar						
D	Kemandirian ( <i>Independency</i> )						
10.	Tidak saling melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif	16,7	33,3	50,0			2,67
11.	Pengambilan keputusan dilakukan dengan objektif, tanpa adanya intervensi dan kepentingan dari pihak manapun	33,3	50,0	16,7			3,17
E	Kewajaran ( <i>Fairness</i> )						
12.	Instansi senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dan pegawai berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran	16,7	83,3				3,17
13.	Instansi memberikan perlakuan setara dan wajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai kontribusi dan manfaat yang di berikan	66,7	3,33				3,67
14.	Instansi memberikan kesempatan kepada seluruh pihak-pihak berkepentingan	16,7	66,7	16,7			3,00

Berdasarkan hasil prasarvei tabel 1.2 terdapat permasalahan mengenai *good corporate governance* di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten OKU. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil rata-rata yang paling terkecil yang terdapat pada indikator pertanggung jawaban yaitu sebesar 2,50 di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten OKU masih terdapat pegawai yang belum melakukan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat

menyebabkan tidak terlaksananya penerapan good corporate governance sehingga bisa menimbulkan *fraud* atau kecurangan. Untuk itu pimpinan harus memastikan kewajiban instansi telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan dengan tepat waktu sehingga penerapan good corporate governance dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan lain yang terjadi dalam penerapan good corporate governance yaitu pada indikator kemandirian yaitu sebesar 2,67, dimana pegawai di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten OKU masih sering melempar tanggung jawab atas pekerjaan sehingga bisa mengakibatkan pekerjaan terbengkalai dan tidak terwujudnya pengendalian internal yang efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten OKU Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten OKU.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini Apakah ada pengaruh pengendalian internal dan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten OKU baik secara parsial maupun simultan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengendalian internal dan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud*

dalam pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten OKU baik secara parsial maupun simultan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan dan menambah wawasan dibidang pendidikan mengenai pengaruh pengendalian internal dan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten OKU.
- b. Menjadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya khususnya dibidang pendidikan.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengendalian internal dan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten OKU.
2. Bagi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten OKU dapat menjadi bahan bacaan dan referensi untuk semakin meningkatkan kualitas pengendalian internal dan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten OKU.
3. Bagi calon peneliti, dapat di gunakan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian mengenai pengendalian internal dan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten OKU pada waktu yang akan datang.

EMAIL: [netyrismawati3@gmail.com](mailto:netyrismawati3@gmail.com)